

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Greenpeace merupakan salah satu organisasi non-pemerintah internasional yang kerap memberikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah atau korporasi yang dianggap tidak peduli terhadap permasalahan lingkungan dan kehidupan binatang di alam liar. Melalui aksi-aksinya Greenpeace berkomitmen untuk merubah perilaku manusia, baik itu bagian dari pemerintah, korporasi, atau perorangan, dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta terciptanya perdamaian. Greenpeace juga tetap menjaga kenetralannya dengan tidak menerima bentuk donasi apapun dari pemerintah dan pelaku bisnis (Parameswari, 2016).

Dalam melakukan aksinya tersebut, Greenpeace lebih banyak melakukan advokasi melalui kampanye yang diantaranya berupa video ataupun tagar yang mereka sebar luaskan melalui media sosial. Beberapa kampanye Greenpeace yang berhasil diantaranya *Give Rainforests a Break Campaign* yang ditujukan kepada Nestlé pada 2010, *Detox Campaign on Fashion* di China pada 2011, *Save the Arctic Campaign* yang ditujukan kepada perusahaan penyedia energi Rusia, Gazprom pada 2012, dan *Living Soils Campaign* di India pada 2013. Kampanye dipilih oleh Greenpeace karena merupakan metode yang cukup efektif dalam mengakomodir permasalahan dalam bidang lingkungan. Dalam *Influencing Climate Policy: The Effectiveness of Australian NGO* yang ditulis oleh L. Hall dan Rose Taplin pada 2006 disebutkan bahwa upaya kampanye lingkungan oleh NGO dewasa ini telah melampaui target dari kampanye itu sendiri, tidak hanya mampu

memengaruhi kebijakan, namun juga berkontribusi meningkatkan *public awareness* (Parameswari, 2016). Greenpeace tidak akan tinggal diam apabila suatu pemerintahan atau perusahaan kedapatan melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan atau mengancam kehidupan binatang.

Greenpeace sendiri kini telah tersebar hampir di seluruh negara, salah satunya di India. Greenpeace India hadir dengan slogan, “Greenpeace ada karena bumi yang rapuh ini layak disuarakan, perlu perubahan, perlu solusi, dan perlu tindakan”. Greenpeace India sendiri tidak menerima dana dalam bentuk apapun dari pemerintah ataupun perusahaan, melainkan dari dana sumbangan yang diberikan oleh sebagian warga India untuk menjalankan kampanye atau program-programnya. Beberapa kampanye atau program yang berhasil dilakukan oleh Greenpeace India, diantaranya seperti menekan penghentian penggunaan pestisida, menekan perusahaan untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan (greenpeace.org/india). Greenpeace biasanya tidak sendirian dalam melakukan kampanyenya, seringkali Greenpeace melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok lokal ataupun aktor-aktor lainnya dalam mensukseskan kampanyenya tersebut.

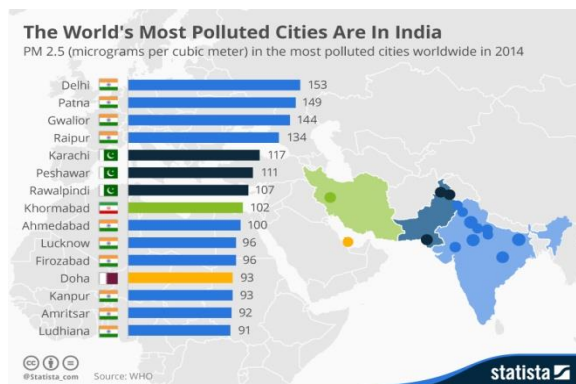
Polusi udara sendiri sudah menjadi salah satu permasalahan besar di India yang juga memberikan dampak pada lingkungan dan perubahan iklim. Menurut laporan *State of Global Air (SOGA) 2019* yang dikeluarkan oleh *Health Effect Institute*, polusi udara berkontribusi terhadap satu dari sepuluh kematian pada tahun 2017 dan telah menjadikannya sebagai penyebab kematian yang lebih besar dari malaria dan kecelakaan di jalan. Masa hidup anak-anak di Asia Selatan berkurang 30 bulan sebagai dampak dari polusi udara. Mengutip pernyataan dari Robert O’Keefe, wakil presiden dari *Health Effect Institute*, polusi udara menyumbang sekitar

41% dari kematian global akibat penyakit paru obstruktif kronik, 20% dari diabetes tipe 2, 19% dari kanker paru-paru, 16% dari penyakit jantung iskemik, dan 11% akibat stroke (Health Effect Institute and Institute for Health Metrics and Evaluation's Global Burden of Disease Project, 2019). Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Asia Selatan memiliki tingkat paparan tertinggi terhadap PM2.5, yaitu ukuran partikel yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan masalah kardiovaskular, dengan Nepal dan India yang memiliki tingkat paparan tertinggi terhadap partikel tersebut (Harvey, 2019).

Pada tahun 2014, *World Health Organization* (WHO) mengeluarkan sebuah laporan yang didalamnya berisi peringkat dari sekitar 1.600 kota di 91 negara untuk kualitas udara mereka yang diukur pada konsentrasi PM10 dan PM2.5. Partikel-partikel ini sangat berbahaya dan akan menempel di paru-paru serta dapat menyebabkan berbagai penyakit. Berikut adalah grafik peringkat kota paling tercemar yang terdapat dalam laporan WHO:

Gambar 1. 1

The World's Most Polluted Cities are in India



Sumber: Niall McCarthy, *The World's Most Polluted Cities are India*, Statista. (McCarthy, 2015)

Dalam laporan yang dikeluarkan WHO tersebut dapat dilihat bahwa 13 dari 20 kota paling tercemar berada di India. Delhi yang merupakan ibu kota India berada pada peringkat pertama sebagai kota paling tercemar di dunia dengan rata-rata tahunan 153 kilogram PM2.5 per meter kubik. Tentu hal ini bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan bagi negara tersebut (Mathiesen, 2015). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan polusi di Delhi sangat parah, diantaranya adalah adanya lalu lintas yang padat, TPA yang besar dan terkadang sampah-sampah tersebut dibakar, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan asap pembakaran tanaman di ladang-ladang pertanian yang muncul pada musim-musim tertentu. Anumita Choudhury, seorang perwakilan dari sebuah kelompok *thinktank* di Delhi yang bernama *Center for Science and Environment* (CSE), mengatakan bahwa penggunaan kendaraan pribadi di Delhi antara tahun 1991 dan 2011 meningkat menjadi 8 juta kendaraan sementara pemerintah India tidak terlalu memerhatikan transportasi umum lantaran kekurangan investor. Para *environmentalist* menyebutkan bahwa 40-50% partikel PM 2.5 di Delhi disebabkan oleh kendaraan (Burke, 2015). Jumlah kendaraan yang sangat banyak ditambah dengan adanya generator listrik diesel skala kecil dan pabrik batu bara di sekitarnya telah merusak fungsi paru-paru dari 4,4 juta anak-anak Delhi. Hal ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua di India, khususnya di Delhi, sebab anak-anak dengan usia antara dua dan tujuh tahun merupakan yang paling rentan terpapar dampak dari polusi udara (Mathiesen, 2015).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *The Lancet Commission on Pollution and Health*, pada 2015 sekitar 2,5 juta warga India telah meninggal akibat polusi udara. Paparan polusi udara yang tinggi dan terjadi selama bertahun-tahun dapat memengaruhi sistem pernapasan dan peradangan manusia yang kemudian akan

mengakibatkan beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, hingga kanker paru-paru (Pujol-Mazzini, 2017). Yang paling rentan terkena dampak dari polusi udara adalah anak-anak dan orang tua lanjut usia. Anak-anak yang terpapar udara yang kotor akan mengalami penghambatan perkembangan paru-paru sepanjang hidup mereka. Sementara orang lanjut usia yang berada di atas 50 tahun memiliki risiko kematian lebih tinggi jika terpapar udara yang kotor dimana sembilan dari sepuluh orang lanjut usia meninggal akibat polusi udara (Health Effect Institute and Institute for Health Metrics and Evaluation's Global Burden of Disease Project, 2019).

Sebelumnya pada tahun 2015, pemerintah India melalui Perdana Menteri Narendra Modi telah mengeluarkan indeks kualitas udara nasional (*National Air Quality Index/NAQI*) pertama untuk memberikan informasi *real time* mengenai tingkat polusi di negaranya. Indeks kualitas udara yang dikeluarkan oleh pemerintah India hanya menjadi alat informasi kualitas udara di daerah perkotaan dan alat untuk mendorong masyarakat untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait polusi udara. Namun pemerintah tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang akan dilakukan oleh mereka untuk mengekang polusi udara (BBC News, 2015). Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh Greenpeace, ditemukan bahwa indeks yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya masih terbatas, kurang transparansi, dan tidak dirancang untuk membuat data kualitas udara tersedia secara luas atau berguna bagi warga (Economic Times, 2015).

Dari penelusuran tersebut Greenpeace juga menemukan perbedaan dalam investasi dan infrastruktur dimana hanya Delhi yang memiliki 103 stasiun pemantauan berkelanjutan, sementara di beberapa wilayah lainnya hanya terdapat satu hingga tiga stasiun pemantau. Namun, di Delhi sendiri data yang dikelurakan

oleh NAQI tersebut tidak ada artinya karena sistem penyebaran informasi yang tidak dapat digunakan. Selain itu, tidak ada langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya oleh otoritas lokal dalam menghadapi polusi serta tidak ada rencana bagaimana data yang ada dalam NAQI digunakan untuk meninformasikan masyarakat untuk melawan polusi (Greenpeace India, 2015).

Dari penelusuran yang dilakukan Greenpeace tersebut, Greenpeace menemukan bahwa pemerintah India belum terlalu serius dalam menangani permasalahan polusi udara yang melanda negaranya. Hal inilah yang kemudian membuat Greenpeace bertekad untuk menunjukkan dirinya sebagai organisasi lingkungan yang sangat peduli terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, Greenpeace kemudian melakukan serangkaian tindakan-tindakannya melalui kampanye untuk menekan pemerintah India segera mengatasi polusi udara yang terjadi di negaranya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana strategi Greenpeace dalam menekan pemerintah India mengatasi polusi udara di negaranya?”

C. Kerangka Berpikir

1. Non-Governmental Organizations

Dalam hubungan internasional, negara bukanlah aktor satu-satunya yang terlibat, terdapat aktor-aktor lain yang juga turut memainkan peran dalam politik internasional, salah satunya adalah organisasi non-pemerintah atau NGO (*Non-Governmental*

Organizations). David Lewis dalam bukunya yang berjudul *The Management of Non-Governmental Development Organizations* mendeskripsikan NGO sebagai sebuah “*voluntary association*” yang memiliki kepedulian untuk merubah sebuah lingkungan tertentu dalam konteks yang lebih baik (Lewis, *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, 2001, p. 30). NGO juga memiliki fungsi kontrol, fasilitator dan mitra pemerintah dan melakukan advokasi atas persoalan-persoalan sosial-politik dan pembangunan. Namun pada dasarnya, NGO dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama, melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemerintah, serta memantau kebijakan dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat (Savitri, Wiranata, & Resen, 2015). Berdasarkan kegiatannya, Philip Eldridge mengklasifikasikan NGO menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Development NGO*, jenis ini lebih berfokus pada program pembangunan masyarakat konvensional, seperti irigasi, air minum, pertanian, peternakan, pusat kesehatan, dan pembangunan ekonomi;
- 2) *Mobilization NGO*, jenis ini memusatkan pada mobilisasi masyarakat miskin terkait isu ekologi, pendidikan, HAM, status perempuan, hak-hak hukum dalam status kepemilikan tanah, hak-hak pedagang, dan tunawisma (Eldridge, 1989).

NGO memiliki beberapa tujuan ketika ia akan didirikan, seperti meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu disekitr, melobi para pembuat keputusan, dan mampu untuk memengaruhi kebijakan domestic maupun luar negeri (Tsauro, 2015). Dalam

sejarah kelahiran dan perkembangannya, NGO memiliki karakteristik, seperti:

- 1) Independen, yaitu tidak berafiliasi pada sebuah kekuatan politik tertentu;
- 2) Nirlaba, yaitu tidak mencari keuntungan atau non-profit;
- 3) Sukarela, yaitu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat;
- 4) Non-birokratis; yaitu tidak melalui prosedur yang rumit;
- 5) Komunitas kecil, yaitu hanya terdiri dari beberapa orang jika dilihat dari struktur dan ruang lingkupnya; dan
- 6) Lahir dan dekat dengan masyarakat bawah atau *grassroot* (Lingkar LSM, 2015).

Sejak tahun 2000an, aktivitas organisasi non-pemerintah telah meningkat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Organisasi non-pemerintah atau di Indonesia lebih dikenal dengan ornop telah diakui sebagai aktor penting dalam pembangunan dan upaya rekonstruksi di Indonesia, India, Thailand, dan Sri Lanka setelah bencana tsunami di tahun 2004. Dalam buku *Non-Governmental Organisations and Development* yang ditulis oleh David Lewis dan Nazneen Kanji, disebutkan bahwa masyarakat mengetahui keberadaan organisasi non-pemerintah karena dua bentuk kegiatan utama mereka, yaitu pemberian layanan dasar kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengorganisir advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk perubahan (Lewis & Kanji, 2009). Pada pelaksanaannya, NGO juga dapat berinteraksi dengan pemerintah dari berbagai negara. Dalam konsep kontemporer, negara tidak hanya mengurus permasalahan *high politics*, namun juga permasalahan *low politics*, seperti masalah lingkungan, feminisme,

hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Dalam menangani permasalahan low politics ini negara dapat bekerjasama dengan aktor-aktor non-negara, seperti IGO, MNC, dan NGO (Alfiansyah, 2016). Munculnya NGO dan posisi yang dimilikinya kemudian ikut serta merubah hubungan antara negara dengan masyarakat. Kehadiran NGO semakin menumbuhkan minat terhadap perkembangan demokrasi di dunia internasional dimana masyarakat sendiri sudah tidak terlalu tertarik kepada demokrasi perwakilan yang secara tradisional. Dari hal ini masyarakat kemudian mencoba untuk menyampaikan aspirasi yang dimilikinya melalui lembaga-lembaga non-profit seperti NGO, sehingga peran NGO lebih besar lagi dalam pengambilan keputusan di sebuah negara (Tsauro, 2015).

Berdasarkan hubungannya dengan negara, Philip Eldridge mengklasifikasikan NGO sebagai berikut:

- 1) *High Level Partnership: Grassroots Development*, yaitu jenis yang ditandai oleh hubungan yang sangat partisipatif dan lebih mengutamakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Selain itu, jenis ini juga memiliki minat yang kurang pada hal yang bersifat politis, namun memiliki perhatian yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan selalu menjaga dukungan pada tingkat *grasroot*;
- 2) *High Level Politics: Grassroot Mobilization*, jenis ini lebih cenderung hanya aktif dalam kegiatan politik dan umumnya bersifat advokatif, terutama dalam mendukung peningkatan kesadaran politik di tingkat masyarakat;
- 3) *Empowerment at the Grasroot*, jenis ini lebih memfokuskan perhatiannya pada

pemberdayaan masyarakat pada tingkat grassroot atau masyarakat bawah dan tidak memiliki keinginan untuk mengadakan kontak dengan pemerintah. Jenis ini umumnya juga tidak mau terlibat dalam kegiatan yang berskala besar (Lingkar LSM, 2015).

Sama halnya seperti sebuah organisasi pada umumnya, NGO juga memiliki struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan pendanaannya sendiri. Biasanya masing-masing NGO memiliki cara kerjanya masing-masing yang juga didasarkan atas dasar-dasar dibentuknya NGO tersebut. Namun dalam hal pendanaan, sebagian besar NGO mengaturnya secara mandiri melalui sumbangan dari para anggota dan donator. Sumbangan dilakukan karena NGO dibentuk secara independen tanpa adanya pemberian dana dari pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah dan perusahaan (Tsauro, 2015).

Greenpeace sendiri jika dikategorikan kedalam kategori NGO diatas termasuk kedalam *Mobilization NGO*. Hal ini karena Greenpeace berusaha untuk memusatkan perhatiannya pada isu-isu ekologi atau lingkungan. Jika dilihat dari hubungannya dengan negara, Greenpeace dikategorikan sebagai *High Level Partnership: Grasroot Development* karena Greenpeace memiliki kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan secara aktif dan partisipatif. Pergerakan yang dimiliki oleh Greenpeace bersifat advokatif yang dapat dilihat dari sikapnya dalam memberikan dukungan secara aktif terhadap isu-isu perusakan lingkungan, salah satunya adalah isu polusi udara yang terjadi di India. Greenpeace sangat vokal dalam menyerukan aksi-aksinya dalam membuka mata masyarakat India untuk lebih peduli terhadap polusi udara yang terjadi di negaranya. Greenpeace juga secara aktif memobilisasi pergerakannya terkait

masalah polusi udara di India agar dapat didengar oleh pemerintah, sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang baik dalam mengatasi isu tersebut.

Dalam menjalankan program-programnya, Greenpeace biasanya mendapatkan pendanaan dari para donatur yang memberika sumbangan kepada Greenpeace. Dalam kasus ini, Greenpeace merasa bahwa pemerintah India tidak terlalu memberikan usahanya dalam mengatasi polusi udara. Oleh karena itu, melalui kampanye yang dibawanya, Greenpeace berhasil membawa aspirasi masyarakat dan menjadi wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Melalui kampanye tersebut, Greenpeace berhasil mengajak masyarakat dari semua kalangan untuk mendesak pemerintah agar mengembalikan hak mereka untuk mendapatkan udara yang bersih.

2. Transnational Advocacy Networks

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) atau Jaringan Advokasi Nasional oleh Keck & Sikkink. Jaringan advokasi networks merupakan bentuk hubungan kerjasama yang memiliki karakteristik sukarela, timbal balik, sejajar, dan terikat oleh nilai-nilai bersama dalam pertukaran komunikasi dalam jaringannya (Mulyani, 2015). Jaringan ini memiliki signifikansi transnasional, regional, dan domestic, serta melibatkan para ahli, ilmuwan, dan aktivis. Selain itu, TAN memiliki peran sebagai pendorong proses integrasi regional dan internasional dengan membangun relasi antar aktor, yaitu masyarakat sipil, pemerintah atau negara, dan organisasi internasional. Adapun tujuan dari TAN yaitu sebagai usaha strategis kelompok untuk meningkatkan kesadaran bersama di dunia melalui aksi kolektif yang terlegitimasi

(Syaifani, 2018). Didalam kerangka kerjanya terdapat ide, norma, dan diskursus dalam perdebatan sehingga menghadirkan informasi atau testimoni. Selain mempromosikan norma, TAN juga digunakan sebagai penekan aktor lain untuk mengadopsi kebijakan dan mengawasi kepatuhan sesuai standar regional dan internasional yang telah ditentukan sebelumnya (Keck & Sikkink, 1999).

Dalam tulisannya, Keck & Sikkink juga menyebutkan terdapat beberapa aktor utama yang mampu memberikan kontribusi dalam TAN, yaitu:

- 1) Internasional dan lokal NGO;
- 2) Local social movements;
- 3) Yayasan;
- 4) Media;
- 5) Organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan, dan intelektual;
- 6) Bagian dari organisasi regional dan intergovernmental;
- 7) Badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.

Tidak diperlukan semua aktor diatas untuk membentuk sebuah jaringan advokasi transnasional, beberapa aktor sudah cukup untuk membentuk jaringan tersebut. Dari ketujuh aktor yang telah disebutkan sebelumnya, memang NGO memiliki peran sentral, namun aktor-aktor lain, seperti local social movements, pelaku aktivitas perdagangan, dan pemerintah juga memiliki peran yang cukup besar dalam TAN (Hartini, 2015). Keck & Sikkink juga menyakan bahwa jaringan advokasi transnasional biasanya muncul pada isu-isu dimana:

- 1) Saluran antara kelompok-kelompok domestik dan pemerintah mereka terhambat atau terputus di mana saluran tersebut tidak efektif

untuk menyelesaikan konflik, menggerakkan “pola boomerang” yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan-jaringan ini;

- 2) Aktivistis atau "*political entrepreneurs*" percaya bahwa jejaring akan memajukan misi dan kampanye mereka, dan secara aktif mempromosikannya;
- 3) Konferensi internasional dan bentuk-bentuk kontak internasional lainnya menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan.

Jaringan transnasional mencari pengaruh dalam banyak cara yang sama seperti dilakukan oleh kelompok politik atau gerakan sosial lainnya, tetapi karena mereka tidak terlalu kuat maka mereka harus menggunakan kekuatan informasi, ide, dan strategi mereka untuk mengubah informasi dan konteks nilai dimana negara membuat kebijakan. Agar TAN dapat berjalan dengan baik, Keck & Sikkink mengemukakan empat strategi yang dapat digunakan sehingga mampu mencapai tujuan dari pergerakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Politik informasi (*information politics*), yaitu kemampuan yang dimiliki oleh para anggota jaringan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politis dengan cepat dan kredibel untuk menggerakkan targetnya agar terpengaruh dan merubah kebijakannya;
- 2) Politik simbolik (*symbolic politics*), yaitu kemampuan untuk menggunakan symbol atau tanda, aksi dan cerita tertentu yang dapat menarik perhatian audiens atau pihak-pihak yang posisinya jauh;
- 3) *Leverage politics* atau kemampuan politik untuk mempengaruhi dengan mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk

mempengaruhi sehingga mampu menguatkan pergerakan anggota jaringan tersebut;

- 4) Politik akuntabilitas (*accountable politics*) merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota jaringan dan para aktor dengan menjaga dan mengawasi pemerintah untuk mempertahankan dan konsisten terhadap kebijakan dan prinsip-prinsip yang telah dibuat sebelumnya dan sesuai dengan tujuan mereka.

Dalam tulisan ini penulis mengambil kasus polusi udara yang terjadi di India. Pada kasus ini, Greenpeace menggunakan website resmi mereka serta untuk membingkai informasi yang mereka dapat mengenai polusi udara dan tindakan pemerintah dalam mengatasinya. Laporan dan berita terbaru mengenai kondisi polusi udara di India dan publikasi lainnya diterbitkan di website tersebut. Salah satu laporan yang telah Greenpeace terbitkan di websitenya yaitu yang berjudul *Out of Sight* pada 2016. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa sebagian besar pembangkit listrik di India masih banyak yang melanggar norma MoEFCC. Greenpeace juga menggunakan poster-poster yang mereka sebarluaskan di media sosial untuk menyebarkan informasi yang mereka punya kepada masyarakat luas. Selain itu, cara tersebut juga dapat digunakan untuk mengajak masyarakat dari kalangan manapun untuk bergabung dalam kegiatan yang mereka buat.

Pemerintah India sudah mengeluarkan *National Air Quality Index* (NAQI) pada 2015, namun Greenpeace menganggap bahwa informasi dan fasilitas yang ada dalam indeks tersebut tidak terlalu membantu masyarakat dalam menghadapi polusi udara. Sehingga Greenpeace merasa bahwa pemerintah India belum terlalu serius dalam

menangani permasalahan tersebut. Dari kekhawatiran Greenpeace akan tidak seriusnya pemerintah menangani masalah tersebut dan juga polusi udara yang semakin mengancam kehidupan masyarakat India, Greenpeace kemudian berusaha untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Pada 22 September 2015, Greenpeace meluncurkan kampanye “*Clean Air Nation*” yang mendesak pemerintah India untuk melakukan perbaikan NAQI untuk mengatasi polusi secara efektif (Economic Times, 2015).

Implementasi dari pemaparan diatas adalah terbentuknya jaringan dari gerakan non pemerintah atau yang biasa disebut TAN. Konsep jaringan yang biasanya mereka lakukan menekankan pada hubungan yang terbuka diantara aktor-aktor yang berpengaruh pada isu tertentu. Dalam hal ini Greenpeace berusaha hadir ditengah-tengah kasus polusi udara di India. Pada konsep TAN, NGO tidak bekerja sendirian namun juga dibantu oleh aktor-aktor lain yang memiliki tujuan yang sama, yaitu sebuah perubahan terhadap kebijakan yang menurut mereka belum cukup adil. Dalam kasus ini, Greenpeace tidak sendirian dalam melakukan aksinya tersebut. sejak Desember 2016, Greenpeace telah bekerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat dan organisasi yang kemudian tergabung menjadi sebuah kelompok besar dengan nama *#HelpDelhiBreathe*. Adapun organisasi atau kelompok yang tergabung didalam *#HelpDelhiBreathe* diantaranya adalah *Center for Science and Environment (CSE)*, *Clean Air Asia*, *The Energy and Resources Institutes (TERI)*, pengusaha, kelompok ibu-ibu dengan nama *#MyRightToBreathe*, dan juga warga negara asing yang tinggal di India (Kumar R. , 2018). Kelompok ini kemudian melakukan aksi protes pertamanya pada 17 Januari 2016 yang dilakukan di beberapa titik tertentu, salah

satunya di Jantar Mantar, di pusat Delhi. Aksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi lingkungan dan untuk mendorong langkah-langkah dalam mengurangi polusi udara (India Today, 2016).

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas bahwa peran Greenpeace dalam menekan pemerintah India untuk mengatasi polusi udara dinegaranya, maka hipotesa yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Information politics*, Greenpeace menggunakan informasi yang mereka punya untuk mengajak masyarakat dan aktor lain agar ikut terlibat dalam kegiatannya.
2. *Symbolic politics* yaitu Greenpeace membentuk kegiatan kampanye bernama “*Clean Air Nation*” yang dilakukannya bersama masyarakat dan kelompok masyarakat setempat.
3. *Leverage politics*, Greenpeace menggunakan strategi ini untuk mengajak aktor-aktor lain yang berpengaruh untuk ikut terlibat dalam menekan pemerintah India mengatasi polusi udara di negaranya.

E. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui polusi udara yang terjadi di India pada tahun 2015-2018.
2. Mengetahui peran dan tindakan yang dilakukan oleh Greenpeace dalam kasus tersebut.
3. Mengetahui upaya yang dikeluarkan pemerintah India dalam mengatasi polusi udara di negaranya.

4. Mengetahui efektivitas dari kampanye yang telah dilakukan oleh Greenpeace dalam menekan pemerintah India mengatasi polusi udara

F. Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis dimana penulis mendeskripsikan kemudian menganalisis Greenpeace India sebagai sebuah organisasi internasional di bidang lingkungan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan menggunakan buku-buku terkait maupun jurnal-jurnal dan media tulis lain serta sumber-sumber elektronik, seperti jurnal dan berita baik nasional maupun internasional.

Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi secara rinci dalam menggambarkan gejala maupun praktik yang ada terhadap masalah yang sedang diteliti. Kemudian teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yaitu dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari hasil interpretasi data primer, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber dari media elektronik lainnya kemudian menggunakan konsep atau teori tertentu untuk menggambarkan dan menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis mencoba untuk memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini. Penulis hanya akan membahas mengenai peran Greenpeace sebagai gerakan internasional di bidang lingkungan dalam menekan pemerintah India untuk segera mengatasi polusi udara di negaranya secara efektif dengan melakukan

perbaikan pada *National Air Quality Index* (NAQI) negaranya.

H. Sistematika Penulisan

Pada bab I penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan dan teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan mengenai Greenpeace sebagai sebuah gerakan internasional dalam bidang lingkungan. Akan terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai Greenpeace, yaitu latar belakang terbentuknya Greenpeace, latar belakang Greenpeace India dan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya

Selanjutnya bab III. akan dijelaskan secara rinci mengenai polusi udara yang terjadi di India. Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai penyebab terjadinya polusi udara dan dampak yang diberikan oleh polusi udara kepada kehidupan warga India.

Kemudian di bab IV, penulis akan mendeskripsikan upaya advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace India yang sesuai dengan konsep *Transnational Advocacy Networks*, menjelaskan hasil dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Greenpeace, serta menjelaskan efektivitas dari aksi tersebut.

Dan di bab V akan berisi mengenai kesimpulan yang telah dihimpun dari keseluruhan bab-bab sebelumnya yang disusun dalam bentuk kesimpulan dan saran.